

**DAMPAK KRISIS EKONOMI DAN MASUKNYA BANK UMUM
PADA PASAR KREDIT USAHA MIKRO KECIL
TERHADAP KINERJA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DIY**

Murti Lestari

Universitas Kristen Duta Wacana

Email: murti_lestari@yahoo.com

Abstract

The economic crisis and the entry of commercial banks in the small micro-credit market is estimated to have an impact on rural banks (BPR) business. By using time series data, and using performance measures such as the performance of rural banks lending, third-party funds (savings and deposits), lending rates, and spreads, the study concluded that the entry of commercial banks in the small micro-credit markets do not interfere (negative affect) the performance of BPR DIY. In terms of the economic crisis, the response performance of BPR DIY show mixed reactions. In terms of lending and third-party funds, the economic crisis actually makes BPR is able to raise his credit and increase the ability to collect deposits. While in the case of the determination of interest rates, the crisis negatively affect the interest rate (lower lending rates). Similarly, for a variable spread, the crisis also have negative impacts, which means that with the economic crisis, the ability of BPR take spread decreases.

Keywords: rural bank, micro and small enterprises credit, crisis economy

1. PENDAHULUAN

Analisis industri, termasuk didalamnya industri perbankan, pada umumnya mendasarkan pada *theory of the firm*, dimana secara implisit berbasis pada perilaku usaha besar yang asumsinya bertujuan memaksimalkan profit. Kenyataannya, banyak variasi tujuan perusahaan yang pada intinya tidak selalu memaksimalkan profit (Kreps, 1990 p. 233). Dalam banyak kasus usaha kecil memiliki orientasi yang bisa berbeda dibanding usaha besar. Mohammad Yunus (Microcredit Summit, 2011) bahkan menengarai bahwa kebanyakan usaha kecil lebih merupakan *social business* yang tujuannya bukan memaksimalkan profit, tetapi lebih mengutamakan pada mempekerjakan tenaga kerja yang lebih banyak, memberikan pelayanan yang lebih pada kelompok miskin, dan beberapa tujuan lain yang sifatnya lebih sosial. Dalam hal industri perbankan, perilaku kredit mikro juga memiliki karakter yang berbeda dibanding kredit pada umumnya. Menurut Gutierrez, Serrano, and Mar Molinero (2009), lembaga yang melayani kredit mikro, yaitu *microfinance institution* (MFI), adalah merupakan kasus khusus dalam dunia keuangan. Mereka memiliki peran ganda, yaitu finansial dan sosial, yang dua-duanya membutuhkan tingkat efisiensi. Menurutny sangat tidak fair kalau kinerja MFI hanya diukur berdasarkan kinerja keuangan secara

tradisional, karena menurut pengamatannya MFI lebih memberikan kinerja sosial yang efisien dari pada kinerja keuangan tradisional.

Pandangan diatas diperkuat oleh Painter and Tang (2001); dan Auber and Jenvry (2004). Menurut mereka, *microcredit* adalah *uniqu*e dan sangat berbeda dengan program kredit bagi dunia perbankan pada umumnya. Dari pengamatan mereka di California, menunjukkan bahwa lembaga penyedia *microcredit* tidak saja menyediakan kredit kecil, tetapi harus dilengkapi dengan *training, technical assistance, and less formalized operation*. Dengan karakter yang demikian, maka bagi negara maju, prigram *microcredit* merupakan program khusus pemerintah yang syarat dengan subsidi.

Berbeda dengan negara maju, bagi negara berkembang, seperti di Ghana, India, Pakistan, dan Philipina, pasar kredit mikro banyak dilayani oleh lembaga-lembaga finansial umum, yang bahkan harus berkompetisi dengan lembaga finansial besar termasuk didalamnya bank komersial. Di Ghana, misalnya, pasar kredit mikro dilayani oleh bank (Rural and Community Bank/RBC), Non-Bank Financial Institution, dan Credit Union yang bentuk formalnya semacam koperasi (Steel and Andah, 2003). Dalam operasionalnya, sejak liberalisasi keuangan tahun 1980-an RBC harus bersaing juga dengan bank komersial dalam melayani kredit mikro. Persaingan ini ternyata cukup mengganggu kinerja RBC, karena perilaku (*conduct*) dan kinerja (*performance*) RBC tentu tidak bisa disandingkan dengan industri perbankan secara umum.

Sama halnya dengan Ghana, pasar kredit mikro di Indonesia juga dilayani oleh banyak lembaga keuangan, antara lain bank (bank umum maupun bank perkreditan rakyat), institusi keuangan non bank (*non-bank financial institution*), kelompok kredit (*credit union*), koperasi, dan badan-badan sosial. Namun demikian, meskipun dilayani oleh banyak lembaga keuangan, dari sisi industri perbankan pasar kredit mikro lebih banyak dilayani oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum lebih fokus pada kredit usaha menengah dan usaha besar, kecuali Bank Rakyat Indonesia (BRI). BRI merupakan bank pemerintah yang diberi mandat untuk melayani usaha mikro.

Saat ini, usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia merupakan tulang punggung bagi perekonomian nasional. Data Kementerian Koperasi dan UMKM (2013) menunjukkan dari seluruh jumlah unit usaha di Indonesia 98,85 merupakan usaha mikro, 1,07 merupakan usaha kecil, dan 0,9% siasanya merupakan usaha menengah dan usaha besar. Dalam hal penyerapan tenaga kerja usaha mikro kecil memiliki kontribusi 94,53%; dan kontribusinya dalam pembentukan PDB usaha mikro kecil memiliki porsi sekitar 43,66%. Dengan posisi ini, pemerintah Indonesia memberikan perhatian pada UMK, khususnya permodalan. Dalam hal permodalan, pemerintah Indonesia (dalam hal ini Bank Indonesia) menerbitkan peraturan yang mewajibkan bank-bank umum untuk memberikan kredit bagi UMKM. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil. Peraturan tersebut diperkuat dengan PBI Nomor 6/25/PBI/2004 dan SE Nomor 6/44/DPNP perihal Rencana Bisnis Bank Umum Dalam Penyaluran Kredit UMKM. Dalam aturan tersebut bank umum diwajibkan mencatumkan secara eksplisit penyaluran kredit pada UMKM dalam rencana bisnisnya. Selain itu, muncul pula surat edaran BI berupa SE nomor 8/3/DPNP, dimana dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) bobot risiko untuk kredit usaha kecil (KUK) dikenakan sebesar 85%. Saat ini, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil, diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Peraturan-peraturan ini menunjukkan adanya insentif bagi bank umum untuk menyalurkan kredit pada UMKM yang selama ini menjadi pangsa dari BPR.

**Dampak Krisis Ekonomi dan Masuknya Bank Umum pada Pasar Kredit Usaha Mikro Kecil terhadap Kinerja
(Murti Lestari)**

Bagi usaha mikro kecil, pengembangan kredit mikro yang dilakukan oleh bank umum, tentu merupakan peluang yang sangat menarik. Adanya program tersebut memungkinkan pengusaha UMK yang selama ini sulit untuk mengakses kredit pada bank umum, mendapat peluang akses modal yang lebih luas. Namun demikian, bagi BPR, munculnya peraturan tersebut tentu merupakan tekanan persaingan yang cukup berat mengingat selama ini UMK merupakan pasar spesifik yang dilayani oleh BPR.

Secara teori, peningkatan persaingan justru diharapkan mampu meningkatkan kinerja BPR dalam melayani konsumen. Namun demikian jika dilihat dari sisi kapasitas dalam berbagai sumber daya, kapasitas BPR sangat tidak sepadan dan jauh lebih rendah dari bank umum. Dengan kata lain BPR menghadapi persaingan yang tidak seimbang dengan bank umum dalam operasionalnya di pasar kredit mikro dan kecil.

Kondisi yang dialami BPR Indonesia ini, agak mirip dengan yang dialami oleh RCB Ghana (Steel and Andah, 2010). Pada tahun 1980-an Ghana melakukan liberalisasi industri keuangan, yang mengakibatkan RCB Ghana harus berkompetisi dengan bank umum, bahkan bank asing. Hal ini ternyata berdampak cukup serius, dimana kinerja RCB sangat terganggu. Untuk mengatasi hal ini Government of Ghana mengambil langkah-langkah yang berpihak pada RCB khususnya dalam hal peningkatan kapasitas bagi RCB. Langkah ini cukup berhasil, sehingga RCB berkembang pesat (Nair and Fisha, 2010).

Selain di Ghana, dampak dari terbukanya persaingan di pasar kredit mikro juga dianalisis oleh Cotini (2008). Dengan menggunakan pendekatan matematis Cotini mengungkapkan bahwa bila periode awal pasar kredit mikro dilayani oleh lembaga yang *altruistic*, maka masuknya pesaing baru justru akan mengubah strategi *incumbent* yang merugikan konsumen dalam hal ini nasabah kredit. Namun demikian, menurut Frank (Microcredit Summit, 2009), dengan berbagai kebijakan dan strategi, pada dasarnya MFI dapat bersanding dan berkompetisi secara sehat dengan *commercial investment*.

Dari berbagai gambaran di atas, *micro credit* maupun *rural bank* (Bank Perkreditan Rakyat atau BPR) pada dasarnya cukup tangguh dibanding bentuk-bentuk lembaga keuangan yang lebih besar, terutama dalam menghadapi gelombang krisis ekonomi. Dua peristiwa krisis global yang terjadi pada tahun 1997/1998 dan tahun 2008, BPR menunjukkan ketangguhannya. Pada peristiwa krisis tersebut, lembaga keuangan besar, termasuk bank-bank besar mengalami guncangan yang sangat kuat dan memerlukan intervensi Bank Sentral untuk menyelamatkan. Sementara bagi BPR, meskipun berdampak kuat, namun krisis tersebut tidak sampai membuat guncangan yang cukup berarti.

Di era global potensi krisis ekonomi menjadi lebih besar untuk melanda negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia. Sejak dibukanya globalisasi ekonomi Indonesia berulang kali mengalami gelombang krisis baik besar maupun kecil, sebagai akibat dari permasalahan ekonomi yang terjadi di berbagai belahan ekonomi dunia. Krisis yang terjadi di Amerika tahun 2008 dan yang terjadi di Eropa tahun 2010/2011 memberikan dampak yang cukup kuat bagi dunia usaha tidak terkecuali usaha perbankan di Indonesia termasuk BPR.

Dari beberapa hal yang telah diuraikan diatas, kajian ini bermaksud mengkaji bagaimana dampak kinerja BPR atas masuknya bank umum pada pasar kredit mikro dan kecil di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga bermaksud untuk mengukur dampak kinerja BPR terhadap berbagai krisis yang terjadi di Indonesia. Dugaan awal, diperkirakan masuknya bank umum dalam pasar kredit mikro akan menimbulkan dampak negatif bagi kinerja industri BPR di Indonesia. Begitu pula krisis ekonomi, diperkirakan akan memiliki dampak negatif, meskipun kemungkinan dampak ini akan berlangsung sementara. Oleh karena itu dengan mengukur dampak ini, maka diharapkan riset

ini mampu memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk dapat memberikan kebijakan yang sesuai dalam masa penyesuaian.

2. KAJIAN TEORI DAN RISET TERKAIT

Dari beberapa hal yang sudah diuraikan pada bagian terdahulu, secara umum tujuan penelitian ini adalah mengukur respon kinerja BPR atas masuknya bank umum pada pasar kredit mikro, krisis ekonomi di Indonesia. Secara teknis kinerja dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan empat variabel utama, yaitu kredit, penghimpunan dana pihak ketiga, net interest margin (spread), dan suku bunga kredit. Oleh karena itu secara teknis tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengukur bagaimana dampak krisis ekonomi dan masuknya bank umum dalam pasar kredit mikro, terhadap kinerja kredit yang disalurkan BPR.
2. Mengukur bagaimana dampak krisis ekonomi dan masuknya bank umum dalam pasar kredit mikro, terhadap kinerja pengumpulan dana pihak ketiga yang dihimpun BPR.
3. Mengukur bagaimana dampak krisis ekonomi dan masuknya bank umum dalam pasar kredit mikro, terhadap bunga kredit yang dikenakan BPR.
4. Mengukur bagaimana dampak krisis ekonomi dan masuknya bank umum dalam pasar kredit mikro, terhadap kinerja spread (net interest margin) BPR.

2.1. Batasan Kajian

Untuk lebih fokus dalam melakukan kajian, studi ini mengambil beberapa batasan, meliputi:

1. Wilayah kajian dibatasi DIY. Pemilihan Propinsi DIY juga didasari alasan karena dalam industri perbankan konvensional share kredit yang disalurkan BPR di DIY jauh diatas share kredit yang disalurkan BPR Nasional. Jika share kredit BPR pada tingkat Nasional hanya berkisar 2% share kredit BPR di DIY untuk beberapa tahun terakhir selalu diatas 11%.
2. Krisis yang dikaji adalah gelombang krisis tahun 1997/1998 dan krisis tahun 2008
3. Masuknya perbankan umum dalam pasar kredit mikro di Indonesia, diukur berdasarkan keluarnya Peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan Bank Umum menyalurkan kredit UMKM yaitu tahun 2004.

2.2. Kerangka Teori dan Kajian Pustaka

Secara mikro, adanya tekanan persaingan dalam suatu perusahaan tentu akan mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut. Kinerja perusahaan, misalnya profit, ada kemungkinan akan menurun karena adanya persaingan, dan oleh karenanya perusahaan harus mengembangkan berbagai strategi (Baye, 2009; Salvatore, 2009). Meskipun secara mikro, tekanan persaingan akan membuat kinerja perusahaan terganggu, namun secara makro (industri) tekanan persaingan justru akan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat. Secara teori, bagaimana dampak tekanan persaingan terhadap kinerja suatu industri dapat dijelaskan dengan pendekatan structure conduct performance atau lebih dikenal dengan SCP (Martin, 1994). Dalam teori SCP diuraikan bahwa struktur industri yang berstruktur persaingan sempurna akan menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada industri monopoli. Hal ini tidak terlepas dari apa yang diuraikan oleh (Kotler, et. al., 2008) dan Baye (2010) dalam tekanan persaingan, perusahaan terdorong untuk selalu mengembangkan strategi dalam memuaskan konsumen. Selain itu, kondisi ini juga disebabkan karena dalam struktur monopoli akan menghasilkan kekuatan monopoli (monopoly

power), dimana kekuatan monopoli dapat menimbulkan berbagai inefisiensi manajerial. Inefisiensi manajerial yang muncul karena adanya kekuatan monopoli tidak saja menimbulkan distorsi harga yang menghasilkan *welfare loss*, tetapi juga berbagai distorsi lain, baik distorsi biaya maupun distorsi *rent seeking* (Tirole, 1994; Lipcynski, 2005). Selain itu, struktur persaingan sempurna akan mendorong para pelaku usaha yang beroperasi didalamnya menjadi lebih kreatif dan inovatif untuk meminimumkan biaya sehingga perusahaan dapat memenangkan persaingan karena lebih efisien (Martin, 2005; Lipcynski, 2005). Oleh karena itu dalam struktur pasar yang demikian kesejahteraan (*welfare*) konsumen akan meningkat, dan *welfare* masyarakat secara umum akan maksimal. Karena alasan inilah maka struktur industri yang monopoli biasanya dihindari, dan diarahkan sedemikian rupa sehingga berstruktur persaingan sempurna.

Namun demikian, seperti teori persaingan sempurna pada umumnya, teori SCP tersebut secara tidak langsung mengasumsikan bahwa persaingan yang akan meningkatkan kinerja di pasar adalah persaingan antar pelaku usaha dengan kapasitas yang sepadan, sehingga masing-masing pelaku usaha adalah sebagai price taker (Kreps, 1990; Lipcynski, 2005). Apa bila salah satu menjadi lebih dominan dari pada yang lain, maka pasar tidak lagi berstruktur persaingan sempurna, meskipun jumlah pengusaha banyak. Dengan struktur yang demikian, maka kemungkinan pasar tidak lagi optimal dalam menghasilkan *welfare* bagi masyarakat (Martin, 2005).

Kondisi tersebut juga berlaku untuk industri perbankan, termasuk di dalamnya industri BPR. Sebagai entitas bisnis, BPR memiliki perilaku yang tidak jauh berbeda dengan bisnis dalam industri lain. Dalam tekanan persaingan, BPR akan lebih inovatif dalam melayani konsumen, dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan operasional. Namun demikian, bila persaingan tidak setara, persaingan justru akan menyebabkan gangguan terhadap keberlangsungan industri. Oleh karena itu, apabila pasar dibuka bagi pemain besar, maka kapasitas BPR perlu dinaikkan agar kompetisi yang terjadi merupakan kompetisi yang sehat sehingga menghasilkan kinerja bagi masyarakat yang optimal.

Studi tentang BPR atau lebih dikenal dengan rural bank sudah banyak dilakukan di beberapa negara, seperti India, Ghana, Philipina, China, dan beberapa negara lain. Dari beberapa kajian di berbagai negara tersebut, nampaknya keberadaan rural bank dalam industri perbankan adalah cukup unik, dimana rural bank lebih populer di negara berkembang daripada di negara maju. Kalaupun di negara maju terdapat rural bank, namun karakter rural bank yang ada pada dasarnya adalah bank komersial, hanya saja berlokasi di pedesaan dan melayani pengusaha kecil (Buss and Yancer, 1999), atau bank yang secara khusus mengemban misi pemerintah untuk membantu pengusaha kecil, sehingga tidak berkompetisi dengan bank umum Painter and Tang (2001); dan Auber and Jenvry (2004). Program tersebut biasanya syarat dengan subsidi. Sementara di negara berkembang, dimensi tentang rural bank tidak saja menyangkut lokasi, tetapi juga menyangkut target market yang pada umumnya merupakan masyarakat miskin di pedesaan, dengan perilaku yang sangat spesifik baik dalam kredit maupun aktivitas ekonomi yang lain. Untuk melayani kelompok masyarakat tersebut diperlukan pendekatan dan strategi manajerial yang agak khusus, dan dalam hal itulah keberadaan BPR sangat diperlukan bagi masyarakat kelas bawah (rural).

Dalam kaitannya dengan peran rural bank dalam perekonomian terdapat beberapa kajian yang pada dasarnya menunjukkan bahwa rural bank sangat berperan dalam perekonomian, khususnya bagi masyarakat miskin pedesaan di negara berkembang. Salah satu kajian dilakukan oleh Berges and Pande (2003). Dalam kajiannya, Berges and Pande mengevaluasi kebijakan pemerintah India, yang mewajibkan bank-bank membuka cabang di wilayah rural yang belum *bankable*. Kajian tersebut bermaksud menjawab pertanyaan apakah dengan adanya

rural bank mampu menurunkan kemiskinan di wilayah pedesaan. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa setiap peningkatan jumlah bank di wilayah rural sebesar 1% akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,42%.

Kajian lain yang cukup menarik adalah kajian tentang rural bank di China yang dilakukan oleh Yang (2010). Dalam kajiannya Yang menunjukkan meskipun sektor perbankan di China telah mengalami reformasi selama dua decade, namun masyarakat petani di pedesaan banyak yang belum terlayani oleh jasa perbankan. Untuk itu pemerintah memberikan insentif bagi perbankan untuk membuka rural bank. Pengamatan Yang di wilayah Chengdu, menunjukkan bahwa cukup berat tantangan rural bank di China. Kebanyakan nasabah mengajukan kredit tidak untuk kegiatan produktif, tetapi untuk memenuhi kebutuhan keuangan darurat, seperti sakit dan lain lain. Dari pengamatan ini Yang menyimpulkan bahwa kebijakan untuk rural bank harus spesifik dan mengutamakan peningkatan kapasitas dan mekanisme untuk mendidik masyarakat agar lebih *bankable*.

Apa yang diamati Yang tentang perilaku kredit rural di China, nampaknya tidak jauh berbeda dengan perilaku-perilaku kredit rural di negara-negara lain. Di Indonesia (Robinson, 1992; Bank Indonesia 2009), di Ghana (Nair and Fisha, 2010), dan beberapa negara lain menunjukkan bahwa perilaku kredit rural kebanyakan tidak semata-mata bertujuan untuk usaha tetapi untuk memenuhi aneka kebutuhan. Namun demikian, dari pengamatan di Indonesia (Bank Indonesia, 2009), nampaknya sebagian dari kredit non-usaha kenyataannya digunakan untuk usaha mikro. Karena usaha mikro belum mampu memenuhi administrasi usaha yang standar, maka untuk memudahkan pengajuan kredit, peruntukannya adalah untuk non-usaha.

Kajian lain yang cukup menarik adalah kajian tentang kebijakan liberalisasi bagi rural bank. Dalam kaitannya dengan liberalisasi, ada dua kajian menarik yaitu yang dilakukan di India (Khankoje and Sathye, 2008) dan yang dilakukan di Philipina (CGAP, 1999). Studi yang dilakukan Khankoje and Sathye pada dasarnya mengevaluasi kebijakan deregulasi regional rural bank di India, yang dilakukan pada tahun 1993-1994. Deregulasi bagi rural bank tersebut menyangkut pembebasan rural bank dalam operasionalnya, sehingga suku bunga dan beberapa variabel lain ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Selain itu reserve ratio juga diturunkan sehingga rural bank lebih leluasa untuk menyalurkan kredit. Dalam menyalurkan kreditnya rural bank tidak saja berkompetisi dengan sesama bank, namun juga berkompetisi dengan lembaga keuangan mikro yang banyak beroperasi di wilayah rural. Dengan menggunakan alat analisis DEA, hasil studi tersebut menyimpulkan bahwa setelah berjalan sekian waktu ternyata deregulasi tersebut meningkatkan efisiensi rural bank di India.

Agak mirip dengan India, Philipina (CGAP, 1999) melakukan deregulasi perbankan yang hampir serupa. Dengan adanya liberalisasi finansial tahun 1990-an, Philipina membebaskan rural bank untuk membuka cabang di beberapa wilayah yang dianggap menguntungkan. Kebijakan ini pada dasarnya membuka pasar bagi rural bank, dan memperlakukan rural bank seperti layaknya commercial bank. Untuk mengevaluasi apakah kebijakan ini mampu memperbaiki kinerja rural bank, atau justru sebaliknya, CGAP melakukan studi pada Rural Bank of Panabo (RPB). Pada pasca liberalisasi RPB menghadapi persaingan terhadap bank-bank besar yang cukup ketat. Namun demikian setelah berjalan beberapa tahun kemampuan RPB dalam menghimpun dana justru meningkat, dengan disertai peningkatan efisiensi.

Khusus untuk rural bank di Indonesia, salah satu kajian menarik tentang rural bank di Indonesia telah dilakukan oleh Robinson (1992), dimana fokus penelitiannya menyangkut *financial intermediation* bagi rural bank di Indonesia. Pengamatan tersebut dilakukan dengan fokus pada kredit mikro yang dilakukan oleh BRI (Bank Rakyat Indonesia) yang pada dasarnya merupakan bank umum namun melayani pasar mikro di pedesaan. Dari hasil pengamatannya tersebut disimpulkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki

kinerja sangat baik dalam mengembangkan intermediasi finansial di masyarakat pedesaan. Belajar pada apa yang dilakukan BRI menunjukkan bahwa masyarakat rural di Indonesia pada dasarnya sudah siap, apabila pasar kredit dibuka untuk persaingan secara umum. Dari pengamatan tersebut sebetulnya bagi masyarakat pedesaan terdapat banyak alternatif pembiayaan, baik formal maupun tidak formal.

Kajian lain dilakukan oleh Herri, *et al.* (2008), yang mengkaji tentang peranan BPR dalam pembiayaan usaha mikro kecil (UMK) di pedesaan. Kajian ini mengamati BPR di wilayah Padang, yang hasilnya menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis diskriptif menunjukkan bahwa peran BPR dalam mengembangkan usaha mikro di wilayah Padang cukup signifikan. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas BPR, mengingat masih terjadi berbagai kesenjangan dalam melakukan pelayanan tersebut. Kajian sejenis juga dilakukan oleh Bank Indonesia (2009) yang menunjukkan bahwa terjadi beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh BPR dalam menyalurkan kredit mikro kecil. Meskipun penyaluran kredit MKM melalui kredit konsumsi, namun kenyataannya sebanyak 40% digunakan untuk kegiatan produktif. Berbagai penyesuaian ini tidak terlepas dari strategi BPR untuk meningkatkan penyaluran kredit. Kadang-kadang usaha mikro tidak memiliki persyaratan administrative usaha, sehingga pengajuan kredit menggunakan kredit konsumsi, meskipun digunakan untuk usaha.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Analisis Data

Alat analisis yang akan digunakan adalah alat analisis regresi runtun waktu (*time series*). Metode estimasi yang digunakan adalah metode *ordinary least square (OLS)*. Oleh karena itu untuk menjamin bahwa estimator yang dihasilkan merupakan estimator yang terbaik dan tidak bias (*best linear unbiased estimator* atau lebih dikenal dengan *BLUE*), maka diperlukan beberapa asumsi (Gujarati, 2011), yaitu:

1. Residual dari model estimator berdistribusi normal (*normality*)
2. Tidak terjadi korelasi antar variabel independent (*non-multicolinearity*)
3. Tidak terjadi korelasi antar variabel gangguan (*non-autocorrelation*)
4. Distribusi variance bersifat homogin (*non-heteroscedasticity*)

Keempat asumsi tersebut, lebih dikenal dengan Asumsi Klasik. Untuk membuktikan apakah estimator yang dihasilkan dalam kajian ini mampu memenuhi Asumsi Klasik tersebut, maka studi ini juga dilengkapi dengan uji asumsi klasik atau lebih dikenal dengan uji ekonometri.

Selanjutnya, untuk melakukan estimasi, diperlukan pengukuran atas variabel yang digunakan, baik variabel dependen (yang dipengaruhi) maupun variabel independen (variabel bebas). Sesuai dengan tujuan, variabel dependen dalam studi ini adalah kinerja bank (BPR), sementara variabel independen adalah masuknya bank umum ke pasar kredit mikro kecil dan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Secara teori pengukuran kinerja suatu perusahaan (industri) dapat dilakukan dengan beberapa variabel (Martin, 1994; hal. 14-38), yaitu:

1. Jumlah *output* yang diproduksi, dimana semakin banyak *output* berarti kinerja semakin baik, karena ada indikasi munculnya efisiensi dari skala ekonomis
2. Selisih harga jual *output* dan harga beli input dimana semakin rendah selisih berarti kinerja semakin baik
3. Biaya rata-rata, dimana semakin rendah biaya rata-rata maka semakin tinggi efisiensi yang berarti kinerja semakin baik

4. Keuntungan, dimana apa bila pasar persaingan sempurna, maka semakin besar keuntungan menandakan terjadi efisiensi dalam minimisasi biaya, sehingga semakin besar keuntungan berarti kinerja semakin baik

Atas dasar teori tersebut, maka pengukuran kinerja bank dapat menggunakan beberapa ukuran yang merupakan implementasi dari konsep Martin tersebut. Salah satu pendekatan pengukuran kinerja perbankan dikemukakan oleh Dymski (2002). Sesuai konsep Dymski tersebut, pengukuran kinerja perbankan antara lain:

1. Jumlah kredit yang disalurkan.
2. Jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun.
3. Suku bunga kredit
4. *Spread* antara suku bunga deposito dan tabungan dengan suku bunga kredit, sebagai ukuran selisih harga *input* dan harga *output*.

Kajian ini akan mengestimasi dengan menggunakan empat variabel pengukur kinerja tersebut, dengan pertimbangan penggunaan keempat variabel ini adalah variabel yang secara langsung mengukur kinerja dan tingkat keterdesakan perusahaan, yang dalam hal ini adalah BPR. Sedangkan untuk variabel *shock*, penelitian ini akan menggunakan pengukuran secara *dummy*, yaitu:

1. D_1 mengukur shock masuknya bank umum dalam pasar kredit UKM, yaitu tahun 2004. Oleh karena itu, periode sebelum tahun 2004 memiliki angka *dummy* 0 dan setelah tahun 2004 akan memiliki angka *dummy* 1.
2. D_2 periode krisis tahun 1998, sehingga periode sebelum tahun 1998 memiliki angka *dummy* 0 dan setelah tahun 1998 akan memiliki angka *dummy* 1.
3. D_3 periode krisis tahun 2008, sehingga periode sebelum tahun 2008 memiliki angka *dummy* 0 dan setelah tahun 2008 akan memiliki angka *dummy* 1.

3.2. Model Estimasi.

Atas dasar metodologi yang sudah diuraikan terdahulu, maka studi ini akan menggunakan beberapa empat model utama, yaitu:

1. Model kredit:

$$Y = \alpha + \beta_1 D_1 + \beta_2 D_2 + \beta_3 D_3 + \beta_4 X$$

Keterangan:

- Y : kredit yang disalurkan BPR
 D_1 : *dummy* masuknya bank umum dalam pasar kredit mikro kecil
 D_2 : *dummy* krisis 1998
 D_3 : *dummy* krisis 2008
X : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
 $\alpha, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: konstanta dan koefisien regresi

Model tersebut mengestimasi bahwa kredit BPR tidak saja dipengaruhi oleh *dummy* krisis dan *dummy* masuknya bank umum ke pasar kredit mikro kecil, namun juga memasukkan unsur PDRB. Hal ini dikarenakan meskipun PDRB tidak menjadi fokus analisis, secara teori PDB ataupun PDRB merupakan faktor besaran ekonomi yang sangat mempengaruhi kredit. Secara teori, bila ekonomi sangat bergairah maka kredit akan meningkat, namun bila ekonomi lesu, maka kredit juga akan lesu. Secara teori, ekonomi yang bergairah akan mendorong kegiatan investasi dan kegiatan konsumsi, yang bisa saja dibiayai dengan kredit sehingga bila ekonomi sedang bergairah

maka permintaan kredit akan naik. Demikian sebaliknya bila ekonomi sedang lesu, maka kegiatan investasi dan kegiatan konsumsi akan melambat, sehingga permintaan kredit secara teori juga akan melambat.

2. Model dana pihak ketiga

$$Y = \alpha + \beta_1 D_1 + \beta_2 D_2 + \beta_3 D_3 + \beta_4 X$$

Keterangan:

- Y : dana pihak ketiga yang dihimpun BPR
- D_1 : *dummy* masuknya bank umum dalam pasar kredit mikro kecil
- D_2 : *dummy* krisis 1998
- D_3 : *dummy* krisis 2008
- X : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- $\alpha, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: konstanta dan koefisien regresi

Sama halnya dengan perilaku kredit, dalam hal penghimpunan dana pihak ketiga, PDB ataupun PDRB secara teori sangat mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga. Oleh karena itu, meskipun studi ini tidak secara fokus mengamati dampak PDB ataupun PDRB, namun digunakan untuk mengestimasi, dengan maksud untuk melihat, apakah respon penghimpunan dana pihak ketiga lebih didominasi PDRB ataukah variabel *dummy*.

3. Model suku bunga

$$Y = \alpha + \beta_1 D_1 + \beta_3 D_3$$

Keterangan:

- Y : dana pihak ketiga yang dihimpun BPR
- D_1 : *dummy* masuknya bank umum dalam pasar kredit mikro kecil
- D_2 : *dummy* krisis 2008
- α, β_1, β_2 : konstanta dan koefisien regresi

4. Model *spread*

$$Y = \alpha + \beta_1 D_1 + \beta_3 D_3$$

Keterangan:

- Y : dana pihak ketiga yang dihimpun BPR
- D_1 : *dummy* masuknya bank umum dalam pasar kredit mikro kecil
- D_3 : *dummy* krisis 2008
- α, β_1, β_3 : konstanta dan koefisien regresi

3.3. Data dan Sampel

Untuk mengestimasi model yang sudah dikembangkan, data yang akan digunakan untuk mengukur kinerja BPR adalah data variabel kredit, dana pihak ketiga, dan suku bunga. Pemilihan ini didasarkan pada variabel yang mengukur kinerja perusahaan dan ketersediaan data sekunder yang memungkinkan untuk diakses secara terbuka. Pengamatan akan dilakukan secara tahunan, dimana untuk model kredit dan model dana pihak ketiga,

pengamatan dilakukan mulai tahun 1990 sampai tahun 2011. Sementara, karena keterbatasan data, model *spread* dan model suku bunga kredit, pengamatan dilakukan mulai tahun 2000.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Estimasi dan Analisis terhadap Variabel Kredit

Hasil estimasi model persamaan kredit tersebut secara rinci dapat ditunjukkan pada tabel 1, berikut:

Tabel 1. Hasil Estimasi Model Persamaan Kredit

Variabel	Koefisien	Std Error	t - stat	Prob
C	-9.55E+10	9.28E+10	-1.029054	0.3179
D ₁	-1.39E+11	1.58E+11	-0.880026	0.3911
D ₂	3.48E+11	1.55E+11	2.237272	0.0390
D ₃	7.10E+11	1.43E+11	4.968489	0.0001
PDRB	0.037313	0.015406	2.421918	0.0269
F Statistik	57.91981			
Adjusted R ²	0.915554			

Secara ekonometri hasil estimasi model kredit cukup sah untuk melakukan estimasi, karena tidak melanggar asumsi normalitas, homoskedastisitas, maupun non-autokorelasi. Hanya terjadi multikolinear antara D₂ (krisis tahun 1998) dengan PDRB. Multikolinear ini cukup wajar, mengingat krisis tahun 1998 sangat mengguncangkan perekonomian nasional, termasuk perekonomian DIY. Multikolinear ini secara teori tidak mengakibatkan konsekuensi yang fatal, mengingat asumsi lain dapat dipenuhi dengan baik. Dalam hal uji t, R dan F, model ini juga cukup selaras, sehingga kemungkinan adanya masalah ekonometri yang serius adalah sangat kecil.

Dari tabel 1, dapat ditunjukkan bahwa pengaruh masuknya bank umum ke dalam pasar kredit mikro kecil, bertanda negatif, meskipun tidak signifikan pada α 5%. Hal ini menunjukkan bahwa masuknya bank umum ke pasar kredit mikro kecil mengakibatkan menurunnya kredit yang disalurkan BPR ke pasar kredit, dimana pangsa pasar kredit BPR lebih didominasi pasar kredit mikro kecil. Dampak negatif ini menunjukkan adanya keterdesakan BPR DIY atas masuknya bank umum ke pasar kredit mikro kecil yang selama ini menjadi pasar BPR.

Sementara itu, dampak dari PDRB adalah positif dan signifikan pada α 5%. Ini berarti perekonomian memiliki dampak yang positif terhadap penyaluran kredit BPR DIY, seperti yang dikehendaki teori. Pengaruh positif ini sekaligus menunjukkan bahwa BPR DIY cukup responsive terhadap besaran pendapatan (PDRB), yang berarti bila pertumbuhan ekonomi DIY meningkat maka kredit yang disalurkan oleh BPR DIY juga akan meningkat.

Yang cukup menarik dari model ini adalah dampak dari krisis ekonomi, baik krisis ekonomi tahun 1998, maupun krisis ekonomi tahun 2008. Kedua krisis tersebut menunjukkan adanya dampak positif terhadap penyaluran kredit BPR DIY, dan signifikan pada α 5%. Padahal secara umum, masyarakat perbankan selalu menganggap bahwa krisis merupakan ancaman bagi kinerja perbankan. Pada saat krisis tahun 1998, perbankan nasional bahkan mengalami guncangan hebat hingga menyebabkan krisis multi dimensi. Demikian pula tahun krisis tahun 2008, juga menunjukkan gejala yang sama dimana perbankan nasional sempat mengalami gangguan, meskipun tidak sampai menimbulkan krisis multi dimensi.

**Dampak Krisis Ekonomi dan Masuknya Bank Umum pada Pasar Kredit Usaha Mikro Kecil terhadap Kinerja
(Murti Lestari)**

Dampak positif krisis terhadap pertumbuhan kredit BPR ini, nampaknya menunjukkan bahwa daya tahan BPR sebagai bank kecil dan lokal terhadap guncangan krisis relatif cukup kuat. Hal ini selaras dengan hasil pengamatan Bank Indonesia (2008) di Kota Banjarmasin, dimana dari seluruh BPR yang ada di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa krisis yang terjadi tahun 2008 tidak menyebabkan gangguan yang cukup berarti. Seluruh BPR yang ada menyatakan bahwa kredit yang mereka salurkan masih tetap tumbuh pesat, dan hanya 30% BPR yang merasa bahwa pertumbuhan kreditnya melambat, namun masih tumbuh positif.

Ketahanan BPR dalam menghadapi krisis juga sejalan dengan pengamatan Bank Indonesia (2009) terhadap BPR, BPRS, dan BPD di Propinsi Bengkulu. Perekonomian Propinsi Bengkulu sangat didominasi oleh komoditas perkebunan, terutama kelapa sawit. Nasabah BPR, BPRS sudah tentu juga dipengaruhi oleh pasang surut pasar kelapa sawit. Pada masa krisis 2008, diperkirakan BPR dan BPRS Propinsi Bengkulu akan terpengaruh, mengingat krisis internasional tersebut cukup mengguncangkan pasar sawit dunia. Namun ternyata baik BPR, BPRS, maupun BPD kondisinya cukup stabil, dan tetap tumbuh positif dengan NPL (*nonperformance loan*) yang wajar. Pengamatan Bank Indonesia di Propinsi Bengkulu ini memperkuat pengamatan sebelumnya di Kota Banjarmasin yang menunjukkan bahwa BPR cukup tangguh dalam menghadapi krisis tahun 2008.

Temuan dalam studi ini semakin meyakinkan bahwa kinerja kredit BPR cukup tangguh dalam menghadapi krisis, termasuk BPR di DIY. Jika diamati lebih jauh, tangguhnya BPR terhadap krisis bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Secara regulasi, BPR hanya diijinkan beroperasi untuk pasar lokal, baik dalam penyaluran kredit maupun penghimpunan dana. Selain itu BPR juga tidak diijinkan melakukan transaksi antar propinsi, apa lagi transaksi internasional. Karena hanya berorientasi pada pasar lokal, maka krisis yang bersifat nasional apa lagi yang bersifat global tidak akan mempengaruhi kinerja kredit lokal, bila perekonomian lokal dimana BPR berada tidak terpengaruh krisis tersebut.
2. Secara teknis, sebagai bank kecil, BPR lebih banyak menyalurkan kredit ke pasar kredit mikro kecil, dengan layanan langsung (*personal*). Dari beberapa riset menunjukkan bahwa kelompok usaha UMKM di Indonesia, merupakan kelompok usaha yang relatif cukup tangguh dibanding kelompok usaha besar dalam menghadapi krisis tahun 1998. Kelompok usaha UMKM, khususnya usaha kecil dan mikro memiliki daya tahan yang relatif tinggi, karena kebanyakan operasionalnya tidak tergantung pada ekspor impor, sehingga tidak terpengaruh dengan fluktuasi \$ secara langsung. Dengan skala ekonomi yang bersifat domestik, dan bahkan lokal maka kegiatan usaha mikro kecil menjadi lebih tangguh dalam menghadapi krisis, baik krisis 1998 maupun krisis 2008.
3. Krisis pada umumnya akan mengganggu perbankan, terutama bank umum, melalui naiknya suku bunga. Naiknya suku bunga bank umum ini, akan memperketat kredit, pada kelompok kecil, mengingat kredit kelompok kecil biasanya tidak memenuhi kriteria 5 C secara lengkap, khususnya dalam hal *collateral* (*agunan*). Kondisi ini kemungkinan akan mendorong sebagian kelompok kredit mikro kecil, yang awalnya dilayani bank umum berpindah ke BPR. Hal ini akan semakin mendorong tumbuhnya kredit BPR, meskipun perekonomian sedang dilanda krisis.

Dari kedua argumen tersebut memperkuat bahwa, adalah sangat wajar apa bila dampak krisis justru berpengaruh positif dalam penyalura kredit BPR di DIY.

4.2. Hasil Estimasi dan Analisis Terhadap Variabel Kinerja Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Hasil estimasi model persamaan penghimpunan dana pihak ketiga ditunjukkan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2.

Hasil Estimasi Model Persamaan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Variabel	Koefisien	Std Error	t - stat	Prob
C	-8.46E+10	8.92E+10	-0.947797	0.3558
D1	-1.28E+11	1.65E+11	-0.774967	0.4484
D2	2.41E+11	1.61E+11	1.492989	0.1528
D3	3.08E+11	1.49E+11	2.070001	0.0531
PDRB	0.030093	0.015806	1.903963	0.0730
F Statistik	21.08547			
Adjusted R ²	0.824119			

Sumber: hasil estimasi

Dari tabel 2, dapat ditunjukkan bahwa pengaruh masuknya bank umum dalam pasar kredit mikro kecil adalah negatif namun tidak signifikan. Ini berarti sebetulnya tidak ada pengaruh yang cukup berarti dari masuknya bank umum ke pasar kredit mikro kecil pada usaha kegiatan penghimpunan dana. Padahal secara teknis ada kemungkinan bahwa dengan bank umum banyak melayani kredit mikro kecil, maka debitur mikro kecil tersebut diwajibkan untuk menabung ke bank yang bersangkutan guna memberi pendidikan menabung. Sehingga wajar bila hal ini akan berdampak negatif pada penghimpunan dana pihak ke tiga bagi BPR. namun nampaknya hal ini tidak memberikan pengaruh kuat, atau bahkan tidak signifikan.

Dalam hal merespon krisis, dampak krisis terhadap kinerja penghimpunan dana pihak ketiga oleh BPR DIY adalah positif namun untuk krisis tahun 1998 tidak signifikan (signifikan pada α 15%), sementara krisis tahun 2008 memiliki dampak yang positif dan signifikan pada α 5%. Hal ini merupakan indikasi bahwa sebetulnya kinerja penghimpunan dana pihak ketiga oleh BPR DIY sebetulnya tidak jauh berbeda dengan kinerja penyaluran kredit. Adanya krisis justru memberikan dampak positif. Ada beberapa faktor yang bisa mendorong munculnya dampak positif krisis terhadap kinerja penghimpunan dana BPR, antara lain adalah:

1. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, dalam masa krisis, biasanya pemerintah meningkatkan jumlah tabungan yang dijamin. Selain itu, suku bunga yang dijamin oleh pemerintah (dalam hal ini LPS) di BPR biasanya jauh lebih tinggi dari pada bank umum. Oleh karena itu wajar bila dalam masa krisis justru akan meningkatkan pengumpulan dana pihak ketiga oleh BPRm baik berupa tabungan maupun deposito.
2. Pelayanan BPR biasanya sangat personal. Peningkatan penjaminan oleh pemerintah tersebut sangat memungkinkan bahwa dengan pelayanan yang personal, penabung kelas menengah akan tertarik untuk masuk BPR, meskipun jasa-jasa lain seperti ATM, transfer, dll. masih tetap mengambil dari bank umum.

Dari uraian tersebut, maka wajar bila kinerja pengumpulan dana pihak ketiga justru memiliki respon yang positif terhadap krisis yang terjadi.

Dalam hal PDRB, dampak PDRB terhadap kinerja pengumpulan dana pihak ketiga oleh BPR DIY adalah positif dan signifikan pada α 5%. Hal ini selaras dengan yang dikehendaki teori, dimana PDRB meningkat maka pengumpulan dana pihak ketiga akan meningkat, karena kapasitas ekonomi masyarakat meningkat.

4.3. Hasil Estimasi dan Analisis terhadap Variabel Suku Bunga Kredit

Suku bunga kredit pada dasarnya mencerminkan kinerja bank dalam hal mengukur daya saingnya. Semakin tinggi daya saing bank, maka dengan tingkat persaingan yang tinggi, bank semakin mampu untuk menekan suku bunga kredit guna memenangkan persaingan tersebut. Oleh karena itu, masuknya bank umum dalam pasar kredit mikro kecil, secara teori akan mendorong BPR untuk menurunkan suku bunga kredit yang ditetapkan, karena masuknya bank umum pada pasar kredit mikro kecil menunjukkan adanya peningkatan persaingan yang dihadapi BPR. Dalam hal krisis, karena keterbatasan data, studi ini tidak bisa mengamati dampak krisis pada tahun 1998 dan hanya bisa mengamati krisis tahun 2008. Secara teori, krisis akan meningkatkan suku bunga kredit mengingat suku bunga penghimpunan dana (deposito maupun tabungan) meningkat, sehingga bank mestinya akan meningkatkan suku bunga kredit, untuk menghindari kerugian.

Secara rinci, hasil estimasi terhadap model persamaan suku bunga kredit ditunjukkan pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3.

Hasil Estimasi Model Persamaan Suku Bunga Kredit				
Variabel	Koefisien	Std Error	t - stat	Prob
C	36.92111	0.934743	39.49866	0.0000
D1	-1.620694	1.236549	-1.310659	0.2224
D3	-4.983417	1.086074	-4.588470	0.0013
F Statistik	18.79557			
Adjusted R ²	0.8068			

Lampiran: hasil estimasi

Dari tabel 3, dapat ditunjukkan bahwa baik dampak masuknya bank umum dalam pasar kredit mikro kecil (D1), maupun krisis tahun 2008 (D2) memiliki dampak yang negatif terhadap penetapan suku bunga BPR di DIY. Untuk masuknya bank umum ke pasar kredit mikro kecil tidak signifikan pada α 5% (signifikan pada α 22%), sementara untuk krisis tahun 2008 signifikan pada α 5%, bahkan pada α 1%

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa, meskipun masuknya bank umum ke kredit mikro kecil akan meningkatkan persaingan BPR pada pasar kredit tersebut, namun nampaknya BPR tidak serta merta menurunkan suku bunga untuk menghadapi persaingan tersebut. Secara teori, hal ini memiliki beberapa implikasi antara lain:

1. BPR memiliki ikatan personal yang kuat terhadap nasabah debiturnya, sehingga meskipun masuk beberapa bank ke dalam pasar kredit mikro kecil, BPR tetap tidak kehilangan pangsa sehingga tidak perlu menurunkan suku bunga untuk menarik nasabah debiturnya. Hal ini selaras dengan karakter BPR yang sangat mengutamakan hubungan personel dengan para nasabahnya.
2. Bank umum kebanyakan berada di kota, sehingga untuk melayani kredit kecil di pedesaan bank umum kurang memiliki infrastruktur, kecuali BRI dan BPD. Padahal BPR selama ini lebih banyak beroperasi di masyarakat pedesaan atau masyarakat kota pinggiran (masyarakat sub urban). Dengan demikian masuknya bank umum ke kredit kecil tidak sepenuhnya mengganggu segmen pasar BPR, karena memang segmen-nya berbeda. Dalam hal BRI dan BPD, BPR DIY sejak sebelum tahun 2004 sudah menghadapi persaingan yang sama, sehingga munculnya peraturan yang mewajibkan bank umum melayani kredit usaha mikro kecil, BPR DIY tidak mengalami shock yang permanen.

3. Nampaknya dalam merespon tingkat persaingan yang semakin ketat, BPR tidak menerapkan strategi penurunan suku bunga, tetapi dengan strategi yang lain, misalnya peningkatan kualitas layanan. Pasar kredit mikro kecil, adalah pasar yang sangat khas. Sangat sulit bagi mereka untuk menyediakan collateral (jaminan), tetapi sangat percaya pada hubungan personal. Dengan karakter ini BPR unggul dibanding bank umum karena BPR memiliki infrastruktur yang tepat. Selain itu, pasar kredit yang demikian, kurang sensitif terhadap suku bunga. Oleh karena itu, penurunan suku bunga kemungkinan merupakan strategi yang kurang tepat.

Dari ketiga argumen di atas, maka wajar bila dampak masuknya bank umum ke pasar kredit mikro kecil adalah negatif namun tidak signifikan. Dampak negatif menunjukkan adanya reaksi yang wajar karena menghadapi peningkatan persaingan, namun hal ini tidak permanen karena beberapa karakter BPR di atas.

Dalam hal merespon krisis, nampaknya terdapat fenomena yang menarik. Dampak krisis tahun 2008 terhadap penetapan suku bunga BPR DIY adalah negatif dan signifikan, bahkan untuk α 1%. Jika diaktikan dengan teori, hal ini nampak kurang selaras. Secara rasional, mestinya BPR menaikkan suku bunga kredit, seiring dengan peningkatan suku bunga tabungan dan deposito. Namun demikian, jika ditelusuri lebih jauh, terdapat beberapa hal yang dapat menjelaskan fenomena yang demikian, antara lain:

1. BPR adalah jenis bank yang memiliki hubungan personal dengan nasabah debiturnya. Sehingga dalam situasi krisis, dimana perekonomian dan dunia usaha menghadapi kelesuan, maka kemungkinan BPR justru akan memberikan kemudahan bagi nasabahnya, diantaranya keringanan suku bunga. Hal ini memungkinkan dilakukan oleh BPR, mengingat dalam kondisi normal suku bunga kredit BPR selalu lebih tinggi dari suku bunga bank umum. Oleh karena itu BPR memiliki ruang untuk menurunkan bunga di masa krisis.
2. Selaras dengan kinerja penghimpunan dana, yang sudah diuraikan dalam poin 4.2, krisis tahun 2008, memiliki dampak positif dan signifikan pada α 5%, terhadap penghimpunan dana pihak ketiga. Hal tersebut menjadikan BPR DIY relatif overliquid. Dalam kondisi overliquid, maka BPR mau tidak mau harus menyalurkan dananya tersebut dalam bentuk kredit, dengan cara memberi insentif berupa penurunan suku bunga. Hal ini dikarenakan secara legal, berdasarkan Undang-Undang Perbankan, BPR hanya diijinkan menyalurkan dananya dalam bentuk kredit. Kondisi demikian kemungkinan tidak terjadi pada bank umum, karena bank umum memiliki keleluasaan untuk menyalurkan dananya dalam berbagai bentuk, misalnya valas, saham, dll.
3. Dalam masa krisis, kemungkinan daya beli masyarakat sangat menurun. Akibatnya usaha mikro kecil juga akan sangat menurun. Karena daya beli inilah, maka tidak ada alasan bagi BPR untuk merespon krisis dengan meningkatkan suku bunga, meskipun suku bunga tabungan dan deposito meningkat. Dalam masa ini bahkan merupakan kesempatan bagi BPR untuk meningkatkan jumlah pelanggan, dan karena karakter hubungan personal tersebut, maka melemahnya kredit bank umum di masa krisis akan dijadikan BPR untuk menjaring pelanggan dengan penurunan bunga.

4.4. Hasil Estimasi dan Analisis Terhadap Kinerja Spread

Kinerja *spread* (*net interest margin*), merupakan selisih antara suku bunga penyaluran dana (kredit) dengan suku bunga penghimpunan dana (tabungan dan deposito). Kinerja ini, pada prinsipnya selain mengukur daya saing, juga mengukur efisiensi suatu bank. Selain itu, *spread* juga mengukur kapasitas profitabilitas. *Spread* yang tinggi akan meningkatkan potensi profit yang tinggi, namun bila tidak didorong dengan efisiensi, maka profitabilitas tersebut akan hilang.

Dampak Krisis Ekonomi dan Masuknya Bank Umum pada Pasar Kredit Usaha Mikro Kecil terhadap Kinerja
(Murti Lestari)

Dampak peningkatan persaingan terhadap spread, secara teori bersifat dualistik. Secara teori, persaingan yang tinggi akan menurunkan profitabilitas usaha, karena tekanan persaingan akan mendorong usaha ke struktur pasar persaingan sempurna dimana secara teori usaha di pasar persaingan sempurna akan mencapai keseimbangan pada profit normal (bukan super normal). Namun sebaliknya, terdapat teori *structure conduct performance* (SCP), yang menyatakan bahwa struktur persaingan usaha yang sehat, justru akan mendorong usaha untuk melakukan inovasi sehingga akan meningkatkan efisiensi dan bukan tidak mungkin justru meningkatkan profit. Dengan teori ini, maka adanya peningkatan persaingan pada BPR, justru memungkinkan bagi BPR untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan profit.

Hasil estimasi terhadap model spread secara rinci dapat ditunjukkan pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4.
Hasil Estimasi Model Persamaan *Spread*

Variabel	Koefisien	Std Error	t - stat	Prob
C	18.50444	0.705299	26.23629	0.0000
D1	2.935972	0.933024	3.146729	0.0118
D3	-1.484083	0.819484	-1.810997	0.1036
F Statistik	5.000780 (Prob value: 0.034637)			
Adjusted R ²	0.526355			

Lampiran: hasil estimasi

Sama halnya dengan model persamaan suku bunga kredit, karena keterbatasan data, model persamaan *spread* juga tidak dapat menganalisis dampak krisis tahun 1998, dan hanya menganalisis dua variabel *dummy*, yaitu variabel *dummy* masuknya bank umum dalam pasar kredit mikro kecil, dan variabel krisis tahun 2008.

Dari tabel 4, dapat ditunjukkan bahwa masuknya bank umum dalam pasar kredit mikro kecil memiliki dampak positif terhadap spread, dan signifikan pada α 5%, bahkan pada α 1%. Hal ini menunjukkan situasi yang kurang selaras dengan teori. Dalam persaingan yang ketat, nestinya BPR justru menurunkan spread, atau secara persamaan mestinya masuknya bank umum ke pasar kredit mikro kecil berpengaruh secara negatif terhadap spread BPR. Namun demikian, jika dikaitkan dengan hasil estimasi model suku bunga kredit, masuknya bank umum dalam pasar kredit mikro nampaknya tidak berdampak negatif secara signifikan terhadap bunga kredit yang ditetapkan BPR. Ini berarti suku bunga kredit BPR tidak terpengaruh oleh masuknya bank umum ke pasar kredit mikro kecil. Nampaknya BPR lebih bereaksi pada efisiensi internal, dan kemungkinan justru bereaksi pada penurunan suku bunga dalam penghimpunan dana. Dengan kondisi ini, maka wajar bila masuknya bank umum ke dalam pasar kredit mikro kecil justru berdampak positif pada *spread*.

Secara teori dan empiris, hal tersebut dapat dijelaskan dengan beberapa argumen, antara lain BPR memiliki ruang yang cukup untuk menurunkan suku bunga penghimpunan dana pihak ketiga, karena selama ini BPR selalu menetapkan bunga tabungan dan bunga deposito diatas bank umum. Dengan situasi persaingan yang ketat maka memungkinkan bagi BPR untuk menurunkan suku bunga tersebut.

Sementara itu, dalam menghadapi krisis tahun 2008, BPR menunjukkan respon yang selaras dengan teori. Krisis tahun 2008 memiliki dampak negatif dan signifikan pada α 10%. Ini berarti, dengan adanya krisis BPR menurunkan spread. Jika dikaitkan dengan hasil estimasi model persamaan suku bunga kredit, hal ini cukup konsisten. Dalam masa krisis, dalam pasar perbankan secara umum akan menaikkan suku bunga pengumpulan

dana pihak ketiga. Sementara dari hasil estimasi suku bunga kredit, menunjukkan bahwa BPR tidak bereaksi dengan menaikkan suku bunga kredit, tetapi bahkan memberikan reaksi negatif atau menurunkan suku bunga kredit. Dengan kondisi ini maka cukup rasional bila dampak krisis terhadap spread adalah negatif dan signifikan.

5. PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari hasil analisis data yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, maka studi ini dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Respon kinerja BPR DIY terhadap masuknya bank umum dalam pasar kredit mikro kecil, secara umum tidak banyak terganggu. Respon kredit menunjukkan masuknya bank umum dalam pasar kredit mikro kecil berdampak negatif terhadap penyaluran kredit pada BPR DIY, namun pengaruh itu secara statistik tidak signifikan. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa meskipun masuknya bank umum ke pasar kredit mikro kecil menimbulkan shock, namun shock itu tidak permanen. Sementara itu, jika diukur dengan kemampuan, kesimpulannya hampir sama, dimana penghimpunan dana pihak ketiga oleh BPR DIY tidak dipengaruhi secara signifikan oleh masuknya bank umum ke dalam pasar kredit mikro dan kecil. Hal senada juga ditunjukkan oleh dalam hal penetapan suku bunga kredit. Masuknya bank umum dalam pasar kredit mikro kecil ternyata tidak mempengaruhi BPR DIY dalam menetapkan suku bunga kredit.

Hal yang agak berbeda terjadi pada variabel *spread*. *Spread (net interest margin)* BPR DIY ternyata dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh masuknya bank umum ke pasar kredit mikro kecil. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masuknya bank umum ke pasar kredit mikro kecil justru mendorong persaingan yang sehat, dan menjadikan BPR menjadi lebih efisien sehingga mampu meningkatkan *spread*-nya

2. Dari sisi krisis ekonomi, respon kinerja BPR DIY juga menunjukkan reaksi yang beragam. Dalam variabel kredit, baik krisis 1998 maupun kresis 2008, menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Dalam hal pengumpulan dana pihak ketiga, krisis tahun 1998 berdampak positif namun tidak signifikan, sedangkan untuk krisis tahun 2008, berdampak positif dan signifikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya krisis yang menimbulkan guncangan industri bank secara umum, justru menjadikan BPR mampu menaikkan kreditnya dan menaikkan kemampuan menghimpun dana pihak ketiga, karena beberapa keunggulan BPR dibanding bank umum. Sedangkan dalam hal penetapan suku bunga, krisis tahun 2008 justru berdampak negatif terhadap suku bunga, yang berarti dengan adanya krisis justru direspon BPR dengan menurunkan suku bunga kredit. Untuk variabel *spread*, krisis tahun 2008 menimbulkan dampak yang negatif. Kesimpulan ini konsisten dengan kesimpulan dampak kresis pada suku bunga kredit. Karena dampak krisis pada suku bunga kredit negatif, maka sangat rasional bila krisis juga berdampak krisis pada *spread* yang merupakan selisish suku bunga kredit dengan suku bungan tabungan dan deposito.
3. Selain masuknya bank umum ke pasar kredit mikro kecil, dan krisis, variabel PDRB memebrikan dampak positif dan signifikan pada variabel kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga.

5.2. Saran

Atas dasar kesimpulan yang sudah diuraikan di atas, maka studi ini memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Masuknya bank umum pada pasar kredit mikro kecil tidak memberikan dampak negatif yang cukup berarti bagi BPR DIY. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kepedulian terhadap UMKM dengan mewajibkan bank umum melayani kredit mikro kecil, perlu dilanjutkan. Namun demikian, adanya *shock* negatif yang bersifat sementara bagi BPR, diperlukan program-program yang bersifat penguatan terhadap institusi BPR, sehingga BPR akan lebih mampu meningkatkan kinerjanya.
2. Adanya dampak positif dari krisis terhadap BPR, tidak berarti bisa membiarkan terjadinya krisis ekonomi, mengingat adanya krisis akan menimbulkan gangguan negatif terhadap PDRB. Gangguan terhadap PDRB ini selanjutnya dapat memberikan gangguan pada penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga, mengingat dalam kesimpulan poin 3 ada hubungan yang positif antara PDRB dengan penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ke tiga oleh BPR DIY.
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan, khususnya dalam hal respon BPR yang diukur dengan variabel kinerja lain, misalnya keuntungan, suku bunga deposito, dll. Selain itu, penelitian ini masih sangat terbatas, perlu diperluas, baik dalam hal lokasi maupun runtun waktu. Hal ini penting dilakukan mengingat BPR merupakan representasi lembaga keuangan mikro yang formal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afonso, A. dan Aubyn, M.S., 2008, Macroeconomics Rate of Return of Public and Private Investment Crowding - in- Crowding- out Effects, *European Central Bank, Working Paper Series*, No 864
- Afonso, A dan Sousa, R.M., 2009, The Macroeconomic Effect of Fiscal Policy *European Central Bank, Working Paper Series*, No 991
- Aubert, C., dan Janvry, A., 2004, Creating Incentives for Micro-Credit Agents to Lend to the Poor, Department of Agricultural & Resource Economics, *Working Papers*, University of California, Berkeley, No 988
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil
-----, Peraturan Bank Indonesia No.6/25/PBI/2004
-----, Peraturan Bank Indonesia No. 13/11/PBI/2011 Tentang Pencabutan atas PBI No. 3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/9/ BKR Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil.
-----, Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
-----, Surat Edaran Bank Indonesia No.6/44/DPNP
-----, Surat Edaran Bank Indonesia No.8/3/DPNP
-----, Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat
- Bank Indonesia, 2009, *Kredit Konsumsi Mikro, Kecil dan Menengah untuk Kegiatan Produktif*, Direktorat Kredit, BPR dan UMKM.
-----, 2009, *Dampak Krisis Terhadap BPR dan BPRS Propinsi Bengkulu*
- Baye, M.R., 2006, *Managerial Economics and Business Strategy*, Fifth Edition, McGraw-Hill.

- Burgess, R. dan Pande, R., 2005. Do Rural Banks Matter? Evidence from the Indian Social Banking Experiment, *The American Economic Review*, 95 (3), pp. 780-795
- Buss, T.F; Yancer, L.C., 1999, Bank Loans to Entrepreneurs in Rural America, *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 11 (3), pp. 398-416.
- Casini, P., 2008, Competition and Altruism in Microcredit Markets. [online] available at: www.uclouvain.be/cps/ucl/doc [Accessed 17 Oktober 2013]
- CGAP Savings Initiative, 2005, Philippines Country-Level Savings Assessment, a periodical report
- Enders, W., 2004, *Applied Econometrics Time Series* Second Edition, John Wiley & Sons, Inc.
- Gujarati, D.N.. dan Porter, D.C., 2011, *Econometrics* Fifth Edition, McGraw-Hill, New York.
- Gutierrez, B., Cinca, C.S., dan Molinero, C., 2009. Social Efficiency in Microfinance Institutions, *Journal of the Operational Research Society*, 60, pp. 104-119.
- Herri, Husni, T., Syarif, S., Suhairi, Herman, E., dan Ma'ruf, 2008. Studi peningkatan Peran Bank Perkreditan Rakyat BPR dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil UMK di Sumatra Barat, Center for Banking Research CBR-Andalas University.
- Johnston, Don, and Morduch, Jonathan, 2008, Microcredit vs. Microsaving: Evidence from Indonesia. *World Bank Economic Review*, 22 (3), pp. 517-37.
- Khankhoje, Dilip and Sathye, Milind, 2008, Efficiency of Rural Banks: The Case of India, *International Business Research*, 1 (2).
- Kreps, David M., 1990, *A Course in Microeconomics Theory* First Edition, Princeton University Press, New Jersey
- Lestari, Murti; and Arsyad, Lincolin, 2010, Analysis of Performance Response toward Merger Strategy in Indonesian Banking Industry: A Study on Bank Mandiri, Bank Danamon, and Bank Permata *Gadjah Mada International of Business*, 12 (2).
- Lipezynski, John; Wilson, John; dan Goddard, John, 2005, *Industrial Organization: Competition, Strategy, and Policy* Prentice Hall, Second Edition, England.
- Martin, Stephen, 1994, *Industrial Economics: Economic Analysis and Public Policy* Second Edition, Macmillan Publishing Company, New York.
- Martin, Stephen, 2005, Remembrance of Things Past: Antitrust, Ideology, and the Development of Industrial Economic, Working Paper, Department of Economics Purdue University, Indiana.
- Microcredit Summit Campaign, 2009, Washington, DC, United States of America
- Nair, A., dan Fissaha, A., 2010, Rural Banking: The Case of Rural and Community Banks in Ghana, *The World Bank, Agricultural And Rural Development Discussion Paper No. 48*
- Painter, G., dan Tang, S.Y. 2001. The Microcredit Challenge: A Survey of Programs in California, *Journal of Developmental Entrepreneurship*, 61, pp. 1-16.
- Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- Robinson, M.S., 2005, Why The Bank Rakyat Indonesia Has The World's Largest Sustainable Micro-banking System And what commercial microfinance means for development, *BRI's International Seminar on BRI's Microbanking System*, Bali, Indonesia
- Saunders, A., dan Cornett, M.M., 2006, *Financial Institution Management* Sixth Edition, McGraw-Hill International Edition.

***Dampak Krisis Ekonomi dan Masuknya Bank Umum pada Pasar Kredit Usaha Mikro Kecil terhadap Kinerja
(Murti Lestari)***

- Steel, W.F. and Andah, D.O., 2003., Rural and Microfinance Regulation in Ghana: Implications for Development and Performance of the Industry, Africa Region Working Paper Series No. 49., *World Bank*, Washington, DC.
- Tirole, J., 1989, *The Theory Industrial Organization*, Second Edition, MIT Press.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Yang, S., 2010, A Research on the Development of Rural Banks and the Relief of Rural Financial Difficulties: Taking Chengdu as a Sample Experiment Zone of Comprehensive Reform Package to Balance Urban and Rural Development, *International Journal of Business and Management*, 5 (5).